

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2004

Harga Minyak Akan Turun hingga Akhir Tahun 2004

JAKARTA, KOMPAS — Presiden OPEC Purnomo Yusgiantoro optimistis harga minyak mentah dunia yang saat ini bergerak turun masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2004. Prediksi itu didasari oleh keyakinan bahwa proses pemilihan Presiden AS akan berjalan lancar, penuntasan kasus pajak perusahaan minyak Rusia Yukos akan selesai, dan meredanya krisis di Irak.

Demikian diutarakan Purnomo yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Senin (6/9).

Menurut Purnomo, perdagangan untuk bulan September hingga Oktober tahun 2004 pada saat ini menunjukkan kecenderungan harga semakin turun. Penurunan harga itu diperkirakan akan berlanjut hingga bulan Desember 2004.

Namun, harga minyak mentah yang cenderung menurun akan memberikan dampak kelebihan kapasitas. Dengan demikian, bila ada peningkatan kebutuhan dapat dipenuhi.

Menyinggung agenda pertemuan OPEC pada tanggal 14 September 2004 di Vienna, Austria, Purnomo mengatakan tetap akan membahas keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan minyak dunia. Namun, kecenderungan harga yang

terus turun tetap disikapi.

Pada pertemuan OPEC mendatang, negara non-OPEC akan dilibatkan untuk membahas strategi menurunkan harga minyak yang saat ini masih bertahan di atas harga 40 dollar AS per barrel.

Sudah lebih

Purnomo menambahkan, saat ini produksi OPEC sudah lebih 2 juta barrel per hari dari kuotanya. Sementara pasokan minyak dunia pada saat ini sudah melampaui 1,5 juta barrel per hari dari kebutuhan dunia.

Menurut dia, upaya untuk meningkatkan pasokan minyak dunia adalah dengan meningkatkan investasi untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak. Hal ini akan disampaikan dalam pertemuan Energy Council di Australia yang akan diadakan pekan ini.

HARGA KERANJANG REFERENSI OPEC, 1994-2003
(dollar AS/barrel)

	Aljazair Sahara Blend	Indonesia Minas	Nigeria Bonny Light	Arab Saudi Arab Light	UEA Dubai	Venezuela TJ Light	Meksiko Isthmus	OPEC Referensi Basket
1994	16,19	16,21	16,21	15,39	14,74	14,58	15,36	15,53
1995	17,40	17,64	17,34	16,73	16,10	16,08	16,73	16,86
1996	21,33	20,70	21,24	19,91	18,58	19,63	20,65	20,29
1997	19,62	19,26	19,40	18,71	18,10	17,38	18,26	18,68
1998	13,02	12,31	12,77	12,20	12,15	11,44	12,08	12,28
1999	18,12	17,84	18,07	17,45	17,24	16,31	17,29	17,47
2000	28,77	28,74	28,49	26,81	26,25	26,31	27,80	27,60
2001	24,74	24,11	24,50	23,06	22,83	20,35	22,22	23,12
2002	24,91	25,60	25,15	24,32	23,83	22,61	24,12	24,36
2003	28,73	29,52	28,76	27,69	26,77	26,97	28,25	28,10

Pasar tenang

Harga minyak dalam perdagangan pada hari Senin dibicarakan "tenang", meskipun aksi spekulasi untuk mengambil keuntungan tetap berlanjut. Minyak jenis Brent turun 23 sen dollar AS menjadi 41,00 dollar AS per barrel.

Harga pada saat ini sudah turun 4 dollar AS per barrel dibandingkan pada harga puncak yang terjadi bulan lalu. Bu-

lan lalu, spekulasi mengambil keuntungan besar-besaran dari kenaikan harga sekitar 40 persen dibandingkan dengan harga yang terbentuk tahun lalu.

Harga minyak OPEC juga tercatat turun pekan lalu dengan rata-rata sebesar 2,44 dollar AS menjadi 38,89 dollar AS per barrel. Sementara harga pekan lalu rata-rata 41,33 dollar AS per barrel.

(DOW JONES/REUTERS/BOY)

7

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- MERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 (7) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN : 7 TAHUN 2004

Harga Minyak Mungkin Turun

Pilpres di AS Serta Konflik Yukos Menjadi Pendorong Utama

JAKARTA, (PR).-

Organisasi Negara-negara Peng-eksport Minyak (OPEC) memperkirakan harga minyak mentah dunia periode September-Desember 2004 akan mengalami penurunan.

Demikian dikatakan Presiden OPEC Purnomo Yusgiantoro di sela *workshop* mengenai jasa energi di Jakarta, Senin (6/9). Menurut Purnomo, turunnya harga minyak mentah tersebut disebabkan dua hal yakni pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) yang diharapkan akan berjalan lancar dan konflik di Irak serta kemelut perusahaan minyak raksasa Irak, Yukos, diprediksi akan selesai dalam waktu dekat.

"Laporan yang saya terima dari *future trading*, September hingga Desember kecenderungan harga minyak turun. Penyebabnya ada dua hal, pemilihan Presiden AS dan masalah Irak serta Yukos yang diperkirakan akan cepat selesai. Dengan penurunan ini tentu akan ada *excess capacity* sehingga perhitungan minyak berapa pun besarnya bisa dipenuhi (oleh OPEC)," ungkap Purnomo

Pernyataan Purnomo ini berkaitan dengan pernyataan *Internatio-*

nal Energy Agency (IEA) bahwa OPEC tidak sanggup memenuhi kebutuhan minyak mentah dunia sebanyak 3 juta barel per hari. Dijelaskan Purnomo, salah satu upaya untuk memenuhi permintaan minyak mentah dunia adalah melalui peningkatan investasi.

Masalah ini, menurut Purnomo, merupakan poin yang akan disampaikan dalam pertemuan *Energy Council* di Australia dalam waktu dekat yakni bahwa kebutuhan dunia akan minyak mentah cukup besar.

"Untuk memenuhi itu, diperlukan eksplorasi. Untuk eksplorasi dibutuhkan investasi dan investasi baru bisa dilakukan jika ada penanaman modal," kata Purnomo.

Saat ditanya apakah kecenderungan penurunan harga minyak yang diindikasikan dari *future trading* tersebut akan mengubah visi pertemuan OPEC pertengahan September ini, Purnomo tidak secara tegas memberikan gambaran.

Ia hanya menyatakan dengan kecenderungan harga minyak pada September hingga Desember mendatang dan dilihat dari keseimbangan permintaan dan penawaran,

diperkirakan akan ada kelebihan suplai minyak mentah dunia sebesar 1,5 juta barel per hari. Sedangkan negara-negara OPEC kelebihan supplainya mencapai 2 juta barel per hari.

Tambahan produksi

Sebelumnya, Direktur Pelaksana Badan Energi Internasional (IEA) Claude Mandil, menyatakan diperlukan tambahan tiga juta barel per hari kapasitas produksi di seluruh dunia untuk menghindari harga minyak yang tinggi pada tahun lainnya.

"Kami memperkirakan kebutuhan minyak akan mencapai sekitar 2 juta barel per hari yang lebih banyak pada 2005 dan berbeda dengan rata-rata pada 2004, sehingga kami membutuhkan 3 juta barel per hari kapasitas tambahan secara global untuk menghindari harga minyak yang tinggi pada tahun lainnya," kata Mandil kepada *Reuters* menjelang Kongres Energi Sedunia ke-19 di Sydney.

Ia mengatakan stabilitas politik yang membaik di Timur Tengah juga akan diperlukan untuk mengatasi harga minyak yang tinggi.

Minyak AS, yang didorong oleh tuntutan dunia yang meningkat terhadap minyak serta kekerasan di Irak, memperdagangkan minyak senilai 44 dolar AS per barel hari Jumat, dalam 5,50 dolar AS yang merupakan rekor tertinggi pada Agustus.

Ditanya apakah ia mengharapkan OPEC meningkatkan kuota produksi resmi pada pertemuannya mendatang pada 15 September, "Saya kira OPEC tak segera dapat berbuat banyak karena mereka memproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Hal yang terbaik bagi pertemuan OPEC adalah janji untuk segera berinvestasi dalam kapasitas tambahan".

Mandil mengatakan ia yakin produksi yang lebih tinggi Arab Saudi seharusnya cukup menurunkan harga minyak AS di bawah 40 dolar AS, tetapi ia menolak untuk memberikan keterangan rinci. "Sejauh ini, kami belum melihat dampak harga minyak yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi jika ia tetap dalam tingkatan ini maka kami tentu akan menyaksikannya," katanya. (A-80/reuters/ant)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 3 TAHUN 2004	

Harga Minyak Mentah Diprediksi Turun

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) Purnomo Yusgiantoro, memperkirakan harga minyak mentah periode September-Desember 2004 akan mengalami penurunan.

Menurut Purnomo, turunnya harga minyak mentah disebabkan dua hal, yakni pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) yang diharapkan berjalan lancar dan konflik di Irak, serta kemelut perusahaan minyak raksasa Irak, Yukos, diprediksi akan selesai dalam waktu dekat.

"Laporan yang saya terima dari *future trading*, September hingga Desember kecenderungan harga minyak turun. Penyebabnya ada dua hal, pemilihan Presiden AS dan masalah Irak serta Yukos yang diperkirakan akan cepat selesai. Dengan penurunan ini tentu akan ada *excess capacity* sehingga perhitungan minyak berapapun besarnya bisa dipenuhi," ungkap Purnomo di sela-sela *workshop* mengenai Jasa Energi di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (6/9).

Pernyataan Purnomo ini, berkaitan dengan pernyataan Internasional Energy

Agency (IEA), bahwa OPEC tidak sanggup memenuhi kebutuhan minyak mentah dunia sebanyak 3 juta barel per hari.

Dijelaskan oleh Purnomo, salah satu upaya untuk memenuhi permintaan minyak mentah dunia adalah melalui peningkatan investasi. Masalah ini, menurut Purnomo, merupakan poin yang akan disampaikan dalam pertemuan Energy Council di Australia dalam waktu dekat yakni bahwa kebutuhan dunia akan minyak mentah cukup besar.

"Untuk memenuhi itu, diperlukan eksplorasi. Untuk eksplorasi dibutuhkan investasi dan investasi baru bisa dilakukan jika ada penanaman modal," kata Purnomo, yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Saat ditanya apakah kecenderungan penurunan harga minyak yang diindikasikan dari *future trading* akan mengubah visi pertemuan OPEC pertengahan September ini, Purnomo tidak secara tegas memberikan gambaran. Ia cuma menyatakan, dengan kecenderungan harga minyak pada September-Desember mendatang dan dilihat dari keseimbangan permintaan dan penawaran, diperkirakan ada kelebihan suplai minyak mentah dunia sebesar 1,5 juta barel per hari. Sedangkan negara-negara OPEC kelebihan supplainya mencapai 2 juta barel per hari.

Di bagian lain mengenai status penyelidikan kasus Buyat, Purnomo mengatakan, hasil kajian *peer review* hanya menjadi masukan bagi Tim Teknis pemerintah untuk kasus Buyat. Selanjutnya, Tim Teknis, Tim Pengarah, dan Steering Committee akan bekerjasama untuk menyelesaikan kesimpulan akhir kasus tersebut.

Kasus Buyat

"*Peer review* itu adalah review dari berbagai studi yang akan menjadi masukan bagi Tim Teknis. Lalu, tim pemerintah ini tentunya bekerjasama dengan *steering committee* kemudian akan menyelesaikan kesimpulan akhir tercemar atau tidak, lalu jika tercemar oleh siapa," ujarnya usai membuka acara *workshop* jasa energi di Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, *peer review* yang mengkaji beberapa penelitian menyatakan terdapat indikasi Newmont telah melanggar beberapa ketentuan. Menurut laporan tim tersebut, terdapat empat permasalahan utama di Teluk Buyat, yakni termoklin, biodiversitas,

pencemaran dan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Hasil kajian yang dilakukan selama tiga hari (Senin-Rabu/23-25 Agustus 2004) di Cikampek, Purwakarta, Jabar ini menyebutkan, masih terdapat konsep yang salah tentang termoklin sehingga penerapannya tidak tepat, terutama dalam penempatan tailing terjadi pada kedalaman yang tidak benar.

Dalam hal biodiversitas disebutkan, distribusi komunitas bentos, fitoplankton, dan zooplankton di teluk Buyat berubah menjadi tidak normal. Kemudian, tim itu juga menemukan terjadinya pencemaran.

Diungkapkan, terjadi keragaman data hasil penelitian, namun terlihat indikasi terjadinya peningkatan pencemaran kandungan Hg, As, dan CN, baik dalam sedimen, beberapa jenis ikan dan air. Disebutkan, kandungan pencemaran telah melebihi ambang batas.

Dari sisi peraturan, tim menyebutkan bahwa, terdapat indikasi Newmont melanggar peraturan B-3 (PP No.19/1994), PP 18/1999 jo PP 85/1999 karena membuang tailing yang mengandung B3 tanpa memiliki izin dari Menteri KLH/Kepala Bapedal. PT NMR juga diindikasikan melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin dan RKL/RPL.

Disinggung mengenai sikap DESDM, Purnomo menegaskan, posisi departemennya dalam kasus ini adalah berpegang pada hasil rapat koordinasi (Rakor) Polkam dan Rakor Kesra yang memutuskan pembentukan tim gabungan, antara unsur-unsur terkait dalam kasus tersebut.

"Kita berpegang teguh pada hasil rapat itu di mana sebagai focal point adalah Meneg LH yang jadi Ketua Tim, ditambah dari beberapa instansi lainnya. Kita tunggu itu," katanya. (CW-1)

9

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN : 3

TAHUN 2004

Harga Minyak Dunia Diprediksikan Turun

Presiden Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Purnomo Yusgiantoro, mengatakan perkiraan tersebut didasarkan atas laporan yang diterimanya dari *future trading* (perdagangan berjangka) minyak mentah dunia.

Harga minyak mentah dunia khususnya minyak *light sweet* sempat menyentuh-US\$49/barel dan minyak mentah jenis *brent* sampai US\$45/barel. Namun, kini seiring dengan genjatan senjata antara pemerintah transisi Irak dan pasukan AS dengan milisi Syiah di Irak secara perlahan harga di perdagangan kontrak Oktober 2004 mulai menuju US\$41/barel untuk jenis *brent* dan US\$43/barel untuk jenis *light sweet*.

"Dari indikasi *future trading* menunjukkan bahwa harga akan turun. Ini berita baik!" katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut Purnomo, semua faktor yang menyebabkan penurunan harga minyak di antaranya terkait dengan harapan bahwa pemilihan presiden AS akan berlangsung baik.

Di samping itu, ketegangan antara pemerintah transisi Irak dan kaum Syiah dan gugatan pajak terhadap Yukos Oil diharapkan selesai dalam waktu dekat. Sehingga membaiknya situasi politik negara-negara produsen minyak terbesar dunia menyebabkan penurunan harga. Artinya, akan ada tambahan pasokan minyak masing-masing tiga juta barel per hari (bph) dan tujuh juta bph, sehingga berapa pun permintaan minyak dunia dapat dipenuhi produsen.

JAKARTA (Media): Harga minyak mentah dunia diperkirakan turun pada perdagangan September-Desember 2004. Hal ini terkait dengan membaiknya kondisi di Irak, pemilu di AS, dan dimulainya restrukturisasi perusahaan minyak Rusia, Yukos Oil Co.

Akhir Agustus 2004, Sekretaris OPEC melaporkan bahwa harga minyak mentah patokan organisasi itu sempat merangkak menuju rekor baru pada level US\$43,16 (35,11 euro) per barel.

Ketika itu, harga patokan dari tujuh jenis minyak utama anggota OPEC itu sudah mencapai US\$42,60/barel pada pertengahan Agustus. Pada Juli lalu, harga rata-rata minyak OPEC US\$36,29/barel setelah Juni US\$34,61 dan Mei US\$36,27. Pada kuartal II, harga rata-rata mencapai US\$34,42 dibandingkan US\$30,75 pada kuartal I.

Tetapi, sejumlah analisis optimis harga minyak mentah dunia pada beberapa bulan ke depan akan kembali ke kisaran US\$30/barel karena terjadi titik keseimbangan antara suplai dan permintaan.

Obligasi PLN

Meskipun demikian, Purnomo menambahkan perubahan kondisi yang terjadi bukan berarti akan mengubah agenda sidang OPEC yang akan digelar 14 September 2004 di Wina, Austria. Sidang OPEC tetap menyikapi masalah keseimbangan suplai dan permintaan minyak dunia.

Pasalnya, di pasar terdapat ekstra kapasitas minyak OPEC sebesar dua juta bph, sedangkan di pasar dunia terjadi perbedaan keseimbangan suplai dan permintaan sebesar 1,5 juta bph. Purnomo belum dapat memastikan apakah dalam pertemuan di Wina itu akan diputuskan tentang kenaikan

Membaiknya situasi politik negara-negara produsen minyak terbesar dunia menyebabkan penurunan harga. Akan ada tambahan pasokan minyak masing-masing tiga juta barel per hari (bph) dan tujuh juta bph.

an kuota karena harus memperhitungkan hasil riset yang dilakukan.

"Kami lihat dulu hasil *market research*," ujar Purnomo. Kini kuota produksi OPEC adalah 26 juta bph, namun kenyataannya produksi jauh di atas kuota, hingga mencapai 30 juta bph. Sementara International Energy Agency (IEA) memperkirakan ke depan akan ada kenaikan permintaan minyak mentah dunia hingga tiga juta bph.

Peningkatan permintaan itu tidak akan mampu dipenuhi OPEC. Hanya, Presiden OPEC tidak bersedia memberikan komentar atas prediksi yang dikeluarkan lembaga tersebut karena belum menerima laporan resmi. "Saya belum dapat kabar mengenai itu," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Eddie Widiono mengungkapkan rencana penerbitan obligasi ke VII yang akan dilakukan setelah pemilihan presiden tahap kedua 20 September 2004. Pasalnya, BUMN kelistrikan ini masih mempertimbangkan kondisi pasar agar obligasi tersebut bisa diserap dengan baik.

Eddie menambahkan, kondisi pasar belakangan memang semakin membaik. Tetapi, berdasarkan informasi, pasar yang paling baik adalah setelah pemilihan presiden Indonesia dan AS berakhir. "Karena itu, obligasi sebaiknya dikeluarkan setelah dua agenda tersebut berakhir," kata Eddie.

Kini, PT PLN telah menunjuk konsorsium Danareksa, Bahana, dan Trimegah Sekuritas sebagai penjamin emisi obligasi. Ketiganya akan memberikan masukan, kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan obligasi termasuk berapa nilai yang sebaiknya dikeluarkan.

Eddie mengatakan, PT PLN telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk menerbitkan surat utang maksimal Rp1,5 triliun. Namun, jumlah yang diberikan itu belum tentu dipakai semua.

"Bisa saja kami mengeluarkan obligasi yang besarnya di bawah itu. Pasalnya, pertimbangan yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya nilai obligasi adalah kondisi pasar saat ini."

(Wis/E-2)

10

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

OPEC: September-Desember, Harga Minyak Mentah Dunia Diperkirakan Turun

Jakarta, NERACA

Presiden Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) Purnomo Yusgiantoro memperkirakan harga minyak mentah pada periode September-Desember 2004 akan mengalami penurunan. "OPEC memperkirakan harga minyak mentah di pasaran internasional pada September hingga Desember 2004 akan turun," kata Purnomo, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, turunnya harga minyak mentah tersebut disebabkan karena dua hal. Selain adanya pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) yang diharapkan akan berjalan lancar, penyebab lainnya adalah karena konflik di Irak serta kemelut perusahaan minyak raksasa Irak, Yukos, diprediksi akan selesai dalam waktu dekat.

"Laporan yang saya terima dari *future trading*, pada September hingga Desember kecenderungan harga minyak turun. Penyebabnya ada dua hal, pemilihan Presiden AS dan masalah Irak serta Yukos yang diperkirakan akan cepat selesai," ucap Purnomo.

Dengan adanya penurunan tersebut, menurut dia, tentu akan ada *excess capacity*. "Sehingga perhitungan minyak berapapun besarnya bisa dipenuhi oleh OPEC," kata Purnomo yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia ini.

Sementara pada perdagangan akhir pekan lalu di New York, harga minyak mentah menunjukkan penurunan tipis. Kekhawatiran seputar ancaman pasokan di Irak dan juga di Rusia itu tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pasar minyak.

Kontrak dengan berpatokan minyak mentah New York light sweet untuk pengiriman Oktober, turun 7,0 sen dollar AS menjadi US\$ 43,99 per barel. Di pasar London harga patokan minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Oktober turun 34 sen dollar AS menjadi US\$ 41,23 per barel. "Saat ini terlihat jelas bahwa topan Frances tidak mengganggu

Meksiko, tetapi masuk Florida," kata analis Barclays Capital, Kevin Norrish.

Sebelumnya, Internasional Energy Agency (IEA) menyatakan bahwa untuk bisa menahan lonjakan harga minyak perlu menambah suplai sebesar 3 juta barel per hari. Namun IEA meragukan kemampuan OPEC untuk memenuhi tambahan itu. Namun Purnomo menyatakan, OPEC bisa melakukan itu, salah satu upaya untuk memenuhi permintaan minyak mentah dunia adalah melalui peningkatan investasi.

Purnomo menambahkan, hal itu akan menjadi masukan yang akan disampaikan dalam pertemuan Energy Council di Australia dalam waktu dekat ini. "Yang jelas, kebutuhan dunia akan minyak mentah cukup besar. Untuk memenuhi itu, diperlukan eksplorasi. Untuk eksplorasi dibutuhkan investasi dan investasi baru bisa dilakukan jika ada penanaman modal," papar Purnomo.

Meski begitu Purnomo tidak secara tegas memberikan gambaran mengenai kaitan kecenderungan penurunan harga minyak yang diindikasikan dari *future trading* tersebut bisa mengubah visi pertemuan OPEC pertengahan September 2004.

Ia hanya menyatakan bahwa kecenderungan harga minyak pada September hingga Desember 2004 mendatang itu dilihat dari keseimbangan permintaan dan penawaran diperkirakan akan ada kelebihan suplai minyak mentah dunia sebesar 1,5 juta barel per hari. "Sementara, negara-negara OPEC kelebihan suplainya bisa mencapai 2 juta barrel per hari," kata Purnomo.

Dalam kesempatan itu ia kembali menegaskan, upaya OPEC untuk menstabilkan harga minyak dunia akan dilakukan dengan terus menyediakan pasokan minyak sesuai kemampuan OPEC. Namun demikian, kemampuan OPEC juga terbatas sehingga produsen minyak non-OPEC diharapkan dapat turut meningkatkan

kapasitas produksi dalam rangka membantu stabilisasi harga minyak dunia.

Menurut Purnomo, saat ini OPEC (plus Irak) sudah berproduksi sekitar 30 juta barel per hari atau 2 juta barel per hari di atas kuota OPEC. Dengan jumlah ini, kebutuhan minyak dunia sebetulnya sudah *oversupplied*.

"Namun harga minyak tidak kunjung turun karena masih kuatnya kakhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan khususnya dari Timur Tengah yang dapat berubah dengan cepat. Untuk mengurangi kepanikan pasar terhadap kemungkinan terjadinya gangguan pasokan dari Timur Tengah maka negara-negara non OPEC dapat membantu dengan meningkatkan kapasitas produksi masing-masing," katanya.

Sehubungan dengan hal itu Purnomo menyatakan, OPEC akan melakukan komunikasi lebih intensif dengan negara non-OPEC dalam pertemuan di Wina mendatang untuk mencari solusi terbaik bagi menstabilkan harga minyak mentah dunia saat ini. (31)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2004

OPEC expects crude oil price to fall as uncertainties fade

Agence France-Presse
Jakarta

Crude oil prices are expected to fall over the coming two months as supply uncertainties fade and markets settle on the expectation of a smooth U.S. presidential election, president of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) said on Monday.

"Future trading for September-October indicates a trend toward a drop in prices and this is good news," Purnomo Yusgiantoro, who is also Indonesia's energy minister, told reporters.

He said prices would begin to slide ahead of the U.S. presidential vote in November, which is expected to proceed without a hitch, and the resolution of prob-

lems with Russian oil giant Yukos.

In London, the price of benchmark Brent North Sea crude oil for delivery in October fell 34 cents to US\$41.23 a barrel on Friday.

New York's reference contract, light sweet crude for October delivery, dipped seven U.S. cents to \$43.99 a barrel at Friday's close on the New York Mercantile Exchange.

Oil prices have fallen from record levels of almost \$50 per barrel in New York in August, when the market spiked over supply fears partly centered on Russia's Yukos.

Yukos is locked in a legal battle with the Russian authorities, while its founder Mikhail Khodorkovsky is on trial for tax evasion and fraud. The firm recently

cut its output forecast for 2004.

OPEC members are scheduled to meet on September 14 in Vienna, where they will consider raising the cartel's price band to between \$28 and \$30 a barrel, Qatar's energy minister Abdullah bin Hamad al-Attiyah, was quoted as saying on Saturday.

OPEC's current price range is between \$22 and \$28 a barrel, above or below which it can adjust production.

The cartel agreed at a previous meeting in June to raise its output ceiling by 2.5 million barrels a day in two stages in an effort to curb high world prices.

A rise of two million barrels per day (bpd) went into effect in July and another of 500,000 bpd on Aug. 1.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 5	TAHUN 2004

OPEC: Harga akan turun pada kuartal IV

JAKARTA (Bisnis): OPEC memprediksi harga minyak mentah akan turun pada kuartal IV tahun ini menyusul membaiknya faktor nonfundamental yang menjadi penyebab lonjakan harga komoditas itu.

Presiden Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Purnomo Yusgiantoro menyatakan kenaikan harga minyak hingga level lebih dari US\$49 per barel bulan lalu tidak terjadi hanya karena faktor fundamental berupa keterbatasan pasokan.

"Futures trading untuk September-Desember menunjukkan kecenderungan harga [minyak

mentah] turun. Penyebabnya, pilpres di AS bisa berjalan baik. Irak dan Yukos juga bisa cepat selesai," ujarnya usai pembukaan *workshop* Jasa Energi di Jakarta kemarin.

Menanggapi International Energy Agency (IEA) yang menyatakan dibutuhkan pasokan minyak sampai tiga juta barel per hari (bph) untuk meredam harga, Purnomo menegaskan hal itu akan dipertimbangkan dalam sidang OPEC 14 September 2004.

Dia menyebutkan saat ini sebenarnya sudah terjadi kelebihan pasokan minyak di pasar internasional sekitar 1,5 juta bph. (06)

13

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 2

TAHUN 2004

'Pemerintahan baru warisi bom waktu harga BBM'

JAKARTA (Bisnis): Per-ekonomian Indonesia kembali ringkih, setelah faktor luar—naiknya bunga the Fed, menguatnya US\$ dan lonjakan harga minyak—memukul perekonomian domestik, termasuk membengkaknya beban subsidi bahan bakar minyak menjadi sekitar Rp60 triliun, yang tidak direpons dengan baik dalam kebijakan pemerintah.

Untuk mengulas lebih jauh, Bisnis mewawancarai mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli kemarin. Berikut petikannya.



Rizal Ramli

Mengapa faktor luar bisa nggak nyaman lagi, karena harga minyak?

Tingkat bunga Fed telah naik beberapa kuartal terakhir dan akan terus naik beberapa kuartal mendatang.

Kedua, US\$ terus menguat dan rupiah tertekan. Selain itu, refaknya stabilitas finansial juga disebabkan sejumlah faktor dalam negeri, terutama defisit fiskal yang semakin besar, terutama dipicu kenaikan harga minyak ini, sehingga subsidi [di APBN] naik menjadi sekitar Rp60 triliun hingga akhir tahun, dengan asumsi yang masih di bawah harga riil. Tidak ada tanda-tanda harga minyak internasional akan terkoreksi dalam jangka pendek, meski mungkin terjadi dalam jangka menengah.

Seharusnya, sesuai UU Proenas, subsidi dikurangi bertahap setiap tahun, di awal tahun. Seharusnya, pemerintahan Megawati mengambil langkah-langkah mengurangi subsidi di awal 2004.

Tetapi itu kan tidak dilakukan?

Karena ada pertimbangan politik dan *self complacency*, rasa berpuas diri yang berlebihan dari departemen keuangan. Kemudian penerimaan pajak juga kurang Rp10 triliun dari target saat ini. Secara umum pemerintah saat ini mengalami kesulitan *cashflow*. Beberapa pejabat cerita sebenarnya beberapa waktu lalu benar-bener tak ada uang. Ada uang setelah pemerintah *nerbitin* obligasi. Belum pernah terjadi sebelumnya, stok harian Pertamina soal solar dan BBM sangat rendah, apalagi di luar Jawa sampai sekarang masih terjadi, terutama solar.

Selain soal BBM, juga ada pengeluaran-pengeluaran politis, terkait pembayaran gaji ke-13 yang seharusnya baru dibayarkan akhir Desember, kemudian juga ada pengeluaran jor-joran dalam konteks pemilu.

Jadi pengelolaan fiskal pemerintahan ini fokusnya sangat sempit, hanya sekadar penurunan rasio defisit anggaran terhadap PDB dan melupakan aspek pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ini adalah pendekatan kasir dalam pengelolaan fiskal, yang ternyata, terbukti kasir ini pun tidak profesional dan sangat rentan terhadap tekanan politik.

Apa implikasi dari langkah ini?

Ini buat pelajaran bagi pemerintahan yang akan datang. Pendekatan kasir ini berbahaya. Kalau pengelolaan fiskal negara dengan pendekatan seperti kasir perusahaan menteri keuangan

tidak melihat tujuan makroekonomi yang lebih besar, yaitu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, ini menjadi bom waktu yang diwariskan pemerintahan Megawati kepada siapapun presiden mendatang. Penundaan pengurangan subsidi akan mengakibatkan beban anggaran semakin tinggi dan akan mengakibatkan *adjustment* melalui kenaikan harga BBM bagi pemerintahan mendatang lebih tinggi dari seharusnya.

Jadi harga BBM harus naik?

Ini cuma soal waktu saja, siapapun pemerintahannya. Semakin lama [kenaikan harga] ditunda, *economic cost*nya makin tinggi.

Implikasi ekonominya jadi lebih sakit?

Lebih sakit dan rakyat biasa pun lebih *nggak* terima. Jadi ini adalah bom waktu yang ditinggalkan pemerintahan sekarang untuk pemerintahan yang akan datang, selain *rescheduling* dan restrukturisasi yang mengalihkan beban utang sekarang kepada generasi mendatang.

Ini mau tak mau akan memberikan tekanan terhadap rupiah, seperti melemahnya rupiah belakangan ini. Kalau dibandingkan posisi rata-rata nilai tukar pada saat Megawati naik 2001 sebesar Rp10.180/US\$, dan diperhitungkan dengan inflasi dan lain-lain, posisi rupiah saat ini sekitar Rp9.30-00 an tak jauh beda.

Tekanan terhadap rupiah juga akan berlanjut karena dua faktor, yakni penjualan aset sisa-sisa dari BPPN yang ada di PPA nilainya semakin kecil, sehingga aliran devisa dari penjualan aset ini akan berkurang.

Di samping itu, daya saing produk ekspor Indonesia semakin lemah. Gubernur BI beberapa lalu menyebutkan perekonomian mengalami kemunduran dengan mengungkapkannya 13 komoditas ekspor andalan merosot dan hanya delapan yang tumbuh positif, tujuh diantaranya dari industri primer, sementara industri sekunder yang nilai tambahnya lebih tinggi anjlok semua.

Karena itu, data-data tentang cadangan devisa neto menunjukkan kecenderungan turun. Ini akan memberikan tekanan terhadap ma-

kroekonomi, terutama nilai tukar dan mau tak mau akhirnya berdampak terhadap kenaikan tingkat inflasi dan kenaikan tingkat bunga.

Bagaimana implikasi turunnya daya saing ini?

Pertumbuhan ekspor Indonesia selama pemerintahan ini sangat rendah, rata-rata 5%, paling rendah dalam sejarah Indonesia modern. Jaman presiden Soeharto ekspor masih tumbuh rata-rata di atas 15%. Jaman Gus Dur malah pernah naik di atas 20%.

Kan ada Menperindag yang berasal dari dunia usaha?

Menteri yang bersangkutan lebih sibuk mengurus berbagai macam kuota dan perebutan rente ekonomi dari kuota tersebut, seperti adanya kasus gula dan sebagainya, bukan fokus menggenjot ekspor dan mencari terobosan baru.

Jadi pernyataan gubernur BI punya dasar kuat?

Gubernur BI tentu sudah mulai merasakan tekanan terhadap nilai tukar dan cadangan devisa. Ini membenarkan argumen sebelumnya, bahwa kalau sektor riil *nggak* jalan, investasi sangat minim dan ekspornya rendah dan daya saing merosot, akhirnya akan menggerogoti stabilitas parsial di sektor finansial.

Sayangnya otoritas di Lapangan Banteng selalu menghadapi semua itu dengan mengingkari fakta dan realita, bahwa kondisi fiskal masih terkendali, padahal pemerintah mengalami kesulitan *cashflow*, bahwa stabilitas makro saat ini sangat kuat padahal mulai kelihatan titik-titik keretakan dan kekeroposan. Dan ini akan menyulitkan siapapun pemerintah baru nanti.

Tapi ada keyakinan lahirnya pemerintahan baru akan

diiringi harapan baru, sehingga tekanan tadi tereliminasi dengan sendirinya?

Dalam periode *honey moon*, biasa kan ada optimisme baru. Tapi *at the end of the day* tetap harus diambil keputusan [soal BBM]. Dan sayangnya, keputusan itu sulit, bakal banyak menimbulkan reaksi, akibat pemerintahan sekarang menjalankan kebijakan fiskalnya lebih banyak pertimbangan-politik ketimbang ekonomi.

Bukankah ini kontradiktif dengan langkah konsolidasi fiskal?

Karena itu, konsolidasi fiskal pun akhirnya mulai kelihatan *crack*, retak dan ada bolong-bolongnya. Yang ada adalah bom waktu fiskal yang ditinggalkan pemerintahan sekarang.

Jadi konsolidasi fiskal pun akhirnya dikorbankan?

Dalam praktik dikorbankan oleh pertimbangan politik. Seharusnya subsidi dikurangi [dengan menaikkan harga BBM], tetapi tidak dilakukan. Semakin lama ditunda, biayanya semakin besar. *Kan* setiap bulan Rp5 triliun. *Besar lho* Rp60 triliun (anggaran subsidi, dari semula Rp14 triliun). Sebaliknya pemerintah terus menerbitkan obligasi. Seharusnya, penerbitan obligasi itu untuk keperluan *refinancing*, bukan untuk menutupi *cashflow* terus menerus.

Tahun depan rencana penerbitan obligasi lagi Rp50 triliun?

Ya itulah konsekuensi keputusan yang lebih banyak pertimbangan politiknya, tentu ada komplikasi terhadap anggaran mendatang. Kalau pemerintahan baru lebih kreatif dan lebih inovatif, tentu ada cara atau alternatif lain untuk memperkuat struktur penerimaan dalam negeri. (ab)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
--	---

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 5

TAHUN 2004

Konsumsi BBM industri di KTI diduga turun

MAKASSAR (Bisnis): Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sektor industri di kawasan timur Indonesia (KTI) selama semester pertama 2004 diduga mengalami penurunan sekitar 5% dibandingkan 2003.

"Konsumsi bahan bakar seperti diesel untuk industri agak menurun dalam semester pertama tahun ini, sehingga agak berpengaruh terhadap pencapaian target penjualan kami," ungkap Suheri Manto, Kepala Penjualan PT Pertamina

Unit Pemasaran (UPms) VII, pekan lalu.

Dia memperkirakan penurunan konsumsi bahan bakar tersebut terkait dengan penurunan aktivitas industri tertentu di kawasan ini.

Namun, Suheri menolak menjelaskan lebih rinci tentang jenis industri apa yang mengalami penurunan konsumsi bahan bakarnya tersebut.

Dia menambahkan, akibat kondisi tersebut pertumbuhan penjualan BBM Pertamina pada tahun ini agak mengalami perlambatan. (k5)

15

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 3 TAHUN 2004	

Subsidi Minyak Tanah Dan Keamanan Pasokan BBM

Lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional belakangan ini, yang sempat hampir mendekati 50 dolar AS per barel, sungguh amat merisaukan. Yang pasti, lonjakan tersebut membuat subsidi bahan bakar (BBM) pada tahun anggaran berjalan dapat membengkak 334 persen, yaitu dari Rp 14,5 triliun menjadi Rp 63 triliun. Kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia memberikan dampak terhadap subsidi BBM ini karena Indonesia sudah harus mengimpor BBM dalam volume cukup besar akibat tingkat konsumsi yang terus naik, sementara produksi minyak di dalam negeri sendiri justru cenderung statis.

Beban subsidi BBM yang berlipat 3 kali lebih itu sendiri merupakan konsekuensi yang harusanggung Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas nasional, khususnya sebagai wujud konkret pemberian perlindungan terhadap masyarakat lapisan paling bawah atas risiko gejolak harga BBM. Pemberian perlindungan terhadap masyarakat lapisan paling bawah (prasejahtera) ini ditempuh pemerintah melalui pengaturan harga khusus.

Dalam rangka itu, harga minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga dan usaha kecil ditetapkan Rp 700 per liter dan berlaku sepanjang tahun. Lalu pemerintah juga menetapkan harga diskon terhadap BBM jenis premium dan minyak solar. Di samping itu, pemerintah memberikan pula subsidi langsung kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima, yang disalurkan melalui program kompensasi pencabutan subsidi BBM (PKPS BBM).

Khusus BBM jenis Minyak Tanah yang diperuntukkan bagi lapisan masyarakat paling bawah (kelompok Rumah Tangga dan Usaha Kecil), harga eceran yang ditetapkan Pemerintah Rp 700 per liter jauh di bawah harga patokan maupun harga batas atas (*ceiling price*). Sebelum harga minyak mentah melonjak hebat saja, harga patokan minyak tanah ini sekitar Rp 2.400 per liter, sementara harga batas atas Rp 2.200 per liter. Lalu untuk BBM jenis solar, sejak Januari 2003 pemerintah menetapkan harga sebesar Rp 1.650 per liter. Ini juga jauh di bawah harga patokan sekitar Rp 2.400 per liter maupun harga batas atas sebesar Rp 2.100 per liter.

Walhasil, untuk setiap liter Minyak Tanah bagi kelompok konsumen Rumah

Tangga dan Usaha Kecil, Pemerintah memberi subsidi sekitar Rp 1.700. Sedangkan terhadap BBM jenis minyak solar sekitar Rp 750 per liter. Ironisnya, untuk BBM jenis bensin yang diperuntukkan terutama bagi transportasi mobil pribadi atau kelompok masyarakat yang relatif mampu, Pemerintah masih juga memberikan subsidi sekitar Rp 600 per liter.

Angka-angka subsidi itu, sekali lagi, berdasar kondisi harga minyak mentah di pasar internasional sebelum belakangan ini melonjak hebat hingga mendekati 50 dolar AS per barel. Persisnya, itu tatkala harga minyak dalam APBN 2004 diasumsikan sebesar 22 dolar AS per barel. Sekarang, asumsi harga minyak dalam APBN ini akan direvisi menjadi 36 dolar AS per barel. Justru itu, jelas, nilai subsidi di dalam setiap liter minyak tanah untuk kelompok Rumah Tangga dan Usaha Kecil maupun dalam setiap liter solar dan bensin jauh lebih besar lagi dibanding angka-angka yang disebutkan di muka. Tak heran jika jumlah subsidi BBM dalam APBN 2004 yang akan direvisi pun membengkak menjadi Rp 63 triliun.

Kenyataan itu memprihatinkan karena jelas berdampak kian mengurangi kemampuan APBN dalam menggulirkan program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berbagai studi menunjukkan bahwa semakin besar subsidi BBM, keberlanjutan ekonomi nasional semakin terganggu.

Di sisi lain, subsidi juga membuat keamanan pasokan BBM jadi sulit bisa terjaga. Kenyataan selama ini sudah gamblang menunjukkan, disparitas harga akibat subsidi serta-merta mendorong pihak-pihak tertentu menyelewengkan pasokan BBM bersubsidi ke kelompok

yang tidak berhak (nonsasaran), termasuk menyelundupkannya ke luar negeri.

Akibatnya, di sejumlah daerah, masyarakat yang menjadi kelompok sasaran subsidi kesulitan memperoleh Minyak Tanah. Kalaupun bisa memperoleh komoditas tersebut — notabene dengan susah-payah —, mereka harus membeli dengan harga jauh di atas yang ditentukan Pemerintah sebesar Rp 700 per liter. Kenyataan tersebut niscaya menggugah rasa ketidakadilan di masyarakat.

Keamanan pasokan BBM dalam jangka menengah dan panjang kian serius juga terancam karena pemberian subsidi menjadi disinsentif terhadap program diversifikasi energi. Pengembangan energi baru dan terbarukan, notabene ketersediaannya relatif melimpah, amat sulit bisa dilakukan karena harganya tidak dapat bersaing dengan energi berbasis BBM yang disubsidi Pemerintah dalam jumlah besar. Padahal, di lain pihak, cadangan terbukti (*proved reserved*) minyak bumi Indonesia sekitar 6 miliar barel, dengan produksi sekitar 1 juta barel per hari, hanya dapat bertahan hingga sekitar 12 tahun lagi.

Dalam konteks itu, impor bukan solusi jangka panjang. Perlu diingat bahwa peta perminyakan dunia sekarang ini semakin terkait dengan situasi geopolitik di negara-negara produsen minyak, khususnya di Timur Tengah. Belum lagi tingkat konsumsi BBM di dalam negeri maupun di mancanegara cenderung terus naik. Faktor-faktor tersebut mengondisikan harga minyak dunia cenderung naik. Jadi, alternatif impor amat berisiko bagi upaya pengamanan pasokan BBM di dalam negeri.

Pasokan BBM di dalam negeri dalam

jangka menengah dan panjang hanya mungkin aman jika dikembangkan paradigma baru. Yaitu bahwa BBM bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan anak cucu.

Dalam kerangka itu pula, ke depan ini subsidi BBM kian beralasan secara bertahap dihapuskan. Di samping itu, program efisiensi konsumsi energi perlu konsisten diimplementasikan. Lalu program diversifikasi energi dengan memberdayakan energi baru dan terbarukan sebagai substitusi BBM perlu pula digalakkan.

Khusus penghapusan subsidi BBM, sebenarnya itu sudah dilakukan bertahap sejak tahun 2000. Itu didasari kesadaran bahwa subsidi pada harga BBM tidak efektif mencapai sasaran, di samping itu tadi: mengurangi kemampuan APBN menggerakkan program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun sejak tahun 2003, pemerintah dan DPR sepakat menunda kelanjutan program penghapusan subsidi BBM ini. Langkah populis tersebut dalam rangka menjaga stabilitas nasional terkait pelaksanaan Pemilu 2004. Tetapi kini terbukti sudah bahwa kebijakan tersebut berisiko serius: subsidi BBM kembali membengkak. Bahkan subsidi BBM yang pada tahun anggaran berjalan ini diperkirakan membengkak menjadi Rp 63 triliun praktis sudah jauh melampaui jumlah subsidi pada tahun 2000 sebesar Rp 44 triliun.

Jadi, kebijakan populis itu memang amat mahal. Padahal kebijakan tersebut sudah terbukti tidak efektif mencapai sasaran. Bahkan itu tadi: keamanan pasokan BBM di dalam negeri dapat terancam.***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 5	TAHUN 2004

Pipa BBM Rewulu-Boyolali operasi akhir 2004

SEMARANG (Bisnis): Pembangunan jaringan pipanisasi yang direalisasikan Pertamina untuk pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) sepanjang 66 km dari Rewulu (DIY) menuju Boyolali (Jateng) segera beroperasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah eks Karisiden Surakarta, Salatiga dan sekitarnya.

M. Sustiaji, *General Manager* Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) IV wilayah Jateng dan DIY, mengatakan jaringan pipanisasi untuk pendistribusian BBM di wilayah tersebut dijadwalkan akhir tahun ini sudah dapat dioperasikan. Jaringan tersebut semestinya beroperasi pertengahan ta-

hun, namun mengalami penundaan akibat berbagai kendala teknik.

Kebutuhan BBM untuk konsumen di wilayah itu, lanjutnya, kini masih dilayani dengan sistem pendistribusian melalui jalur darat yang menggunakan angkutan truk-truk tanker yang memakan waktu cukup lama dan penuh risiko.

"Pipanisasi BBM sepanjang 66 km dari Rewulu ke Kabupaten Boyolali itu akan lebih memudahkan pelayanan kepada konsumen dan memberikan jalur pendistribusian BBM ke wilayah tersebut semakin praktis dan cepat," ujarnya akhir pekan lalu. (rsj)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2004

Pertamina akan Kelola 20 Persen SPBU

Pertamina siap bersaing dengan perusahaan multinasional yang diperbolehkan mengelola SPBU.

JAKARTA — PT Pertamina menargetkan akan mengelola sekitar 20 persen dari jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia setelah tahun 2005. Badan usaha milik negara ini siap bersaing dengan pengelola lainnya terutama perusahaan multinasional yang nantinya juga diperbolehkan untuk melakukan kegiatan bisnis ini di dalam negeri.

"Kita upayakan 20 persen SPBU di Indonesia bisa kita kelola sendiri, tapi hal tersebut tergantung anggaran yang perusahaan miliki," kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (persero), Arie Soemarno disela-sela pelaksanaan hari Pelanggan Pertamina di SPBU jalan Industri, Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, upaya tersebut sejalan dengan apa yang akan digariskan dalam Peraturan Pemerintah tentang Sektor Hilir Migas yang saat ini memang belum selesai dibahas. "PP-nya memang belum keluar, tapi pada dasarnya, kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk dapat bersaing dengan pelaku bisnis multinasional yang tentunya masuk ke dalam negeri dengan modal kuat. Hanya yang bermodal kuat yang dapat bersaing," katanya.

Di samping modal yang kuat, mereka yang akan masuk ke Indonesia tentunya memiliki kilang dan tempat penyimpanan yang besar baik itu di Singapura ataupun di wilayah lainnya. Dijelaskannya, untuk pembuatan SPBU yang handal yaitu lengkap dengan sarana seperti pencucian mobil, mini market, bengkel perawatan ataupun sarana perbankan (ATM) diperlukan investasi sekitar Rp 5 miliar di luar harga tanah.

Pada saat ini, jumlah SPBU di seluruh Indonesia ada sekitar 2.537 buah dan

yang dikelola sendiri oleh Pertamina jumlahnya belum banyak diantaranya ada di Jakarta, Palembang, Medan, Makasar, dan Surabaya.

Sementara itu, terkait dengan Hari Pelanggan Pertamina, wilayah Unit Pemasaran III melakukan kegiatan pemberian bunga, pelumas dan penempelan stiker pada kendaraan konsumen serta hadiah kepada konsumen serentak di 17 SPBU di Jakarta dan tiga SPBU di Bandung. Selain itu, bagi konsumen Epiji juga diadakan pelayanan pelanggan di empat pusat perbelanjaan seperti ITC Cempaka Mas, Metropolitan Mall Bekasi, BSD Plaza dan Depok Mall. Kepada pelanggan elpiji akan diberikan hadiah pada setiap lokasi pelayanan.

Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) V juga membagikan minyak pelumas, topi, kaos, stiker dan bunga secara gratis kepada pengendara mobil dan sepeda motor yang sedang mengisi BBM.

Pemberian sejumlah *gift* bagi konsumen yang sudah

berlangsung untuk yang kedua kalinya tersebut dilakukan di 40 SPBU seluruh Indonesia, sedangkan khusus di Surabaya ada lima SPBU, salah satunya dilaksanakan di SPBU Manyar Kertoarjo. "Pertamina ikut berpartisipasi dalam Hari Pelanggan dengan menggelar acara pemberian *gift* selama satu jam untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan kami, sebagai ungkapan terima kasih dari Pertamina," ujar General Manager Pertamina UPMS V, Haryoto Shaleh.

Haryoto mengatakan pelanggan yang diberi *gift* adalah mereka yang sedang mengisi bahan bakar dan membeli pelumas produk Pertamina tepat pukul 10.000 Wib hingga 12.000 Wib. Di SPBU Manyar Kertoarjo, Haryoto didampingi sejumlah pejabat Pertamina dan beberapa orang SPG terlihat langsung berinteraksi dengan konsumen. Pada kesempatan tersebut pihak Pertamina juga melakukan survei kepuasan pelanggan kepada konsumen. ■ ant/fr

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
--	--

KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
--	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 2												TAHUN 2004																		

Pipa Minyak di Utara Irak Masih Terbakar

Kirkuk. Sampai Minggu kemarin jaringan pipa minyak Irak ke Turki yang terbakar akibat serangan bom masih terbakar dan belum dapat diatasi pihak yang berwenang. Serangan tersebut merupakan aksi sabotase yang terbesar yang pernah terjadi pada fasilitas minyak Irak pada masa pasca-pendudukan AS, menyebabkan berkurangnya ekspor minyak Irak sampai 600.000 barel setiap hari.

Diperkirakan, perbaikan pipa minyak itu akan memakan waktu paling tidak sepekan setelah pemadaman kebakaran jaringan pipa minyak di daerah Riad, sekitar 50 Km baratdaya pusat minyak Kirkuk.

Sabotase pipa minyak, dari Kirkuk utara ke pelabuhan Ceyhan, Turki, sebagian besar ditutup sejak invasi yang dipimpin AS. Para pelaku sabotase meledakkannya, Kamis lalu, pada saat aliran minyak sedang bekerja dalam kapasitas penuh.

Tambahan Pasokan

Sementara itu, dari Sydney

dilaporkan, tambahan 3 juta barel per hari kapasitas produksi di seluruh dunia diperlukan untuk menghindari harga minyak yang tinggi pada tahun lainnya, kata direktur pelaksana Badan Energi Internasional (IEA) Claude Mandil, Minggu kemarin.

"Kami memperkirakan kebutuhan minyak akan mencapai sekitar 2 juta barel per hari yang lebih banyak pada 2005 dan berbeda dengan rata-rata pada 2004 sehingga kami membutuhkan sesuatu seperti 3 juta barel per hari kapasitas tambahan secara global untuk menghindari harga minyak yang tinggi pada tahun lainnya," katanya, menjelang Kongres Energi se-Dunia ke-19 di Sydney.

Ia mengatakan stabilitas politik yang membaik di Timur Tengah juga akan diperlukan untuk mengatasi harga minyak yang tinggi.

Minyak AS, yang didorong oleh tuntutan dunia yang meningkat terhadap minyak serta kekerasan di Irak, mem-

perdagangkan minyak senilai 44 dolar per barel hari Jumat, dalam 5,50 dolar AS yang merupakan rekor tertinggi pada Agustus.

Ditanya apakah ia mengharapkan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) meningkatkan kuota produksi resmi pada pertemuannya mendatang pada 15 September, Mandil menjawab,

"Saya kira OPEC tak segera dapat berbuat banyak karena mereka memproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Hal yang terbaik bagi pertemuan OPEC adalah janji untuk segera berinvestasi dalam kapasitas tambahan".

Mandil mengatakan ia yakin produksi yang lebih tinggi Arab Saudi—eksportir utama minyak dunia—seharusnya cukup menurunkan harga minyak AS di bawah US\$ 40 per barel, tetapi ia menolak untuk memberikan keterangan rinci.

"Sejauh ini, kami belum melihat dampak harga minyak yang tinggi dalam pertum-

buhan ekonomi tetapi jika ia tetap dalam tingkatan ini maka kami tentu akan menyaksikan".

IEA, "penjaga" energi Barat, telah menghitung bahwa peningkatan US\$ 10 harga minyak akan menyebabkan pertumbuhan GDP global menjadi 0,4 persen.

Arab Saudi satu-satunya produsen OPEC dengan kapasitas yang sangat berarti. Para produsen OPEC juga meningkatkan produksinya selama hampir 25 tahun terakhir.

Survei yang dilakukan Reuters bulan ini menunjukkan seluruh produksi pada Agustus dari OPEC meningkat 100.000 barel per hari hingga 29,6 juta barel per hari. Arab Saudi meningkatkan suplai minyak hingga 9,5 juta barel per hari, yang meningkat 250.000 barel per hari.

Tetapi Mandil mengatakan harga minyak yang tinggi tak merubah sikap perusahaan-perusahaan minyak tentang investasi dalam kapasitas baru.

(ant/reuters/hel)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN : 6

TAHUN 2004

Fundamentals the cause of oil price turbulence

Kurtubi
Jakarta

A similar phenomenon is also found in India, which has a population of nearly a billion people. A rise in oil consumption is also found in the United States, the world's biggest oil-consuming country, accounting for 26 percent of the world's total oil consumption, which, in the fourth quarter of 2004 is expected to be between 83.5 and 84 million barrels per day.

In the annual conference of International Association of Energy Economists (IAEE) held in July 2004 in Washington D.C., the executive director of the International Energy Agency (IEA) also acknowledged this phenomenon. Several parties also proposed during the conference that the funds that OECD collected in the form of oil/gasoline tax should be partly returned to oil-producing countries and invested there in the upstream sector.

The purpose of this arrangement is to ensure the continuity in the fulfillment of the world's oil demand will be better guaranteed, something that is also the concern of OECD member states.

It is worth noting that at the price level of \$35/barrel, the oil taxes collected by OECD countries would total about \$1 trillion, far exceeding the gross oil earnings

recorded by all OPEC countries combined, which, at the same price level, amounts to only about \$300 billion. However, this proposal, certainly, failed to get enough support from the conference participants, who were mostly representatives of OECD countries.

Indeed, however, this proposal is not a castle in the sand. Now that the price of oil has reached a relatively high level, many parties in Europe have already suggested the reduction of the gasoline tax rates, which in several countries, like Germany, Great Britain, France and Holland, are three times as much as the market price of oil.

If OECD countries agree to lower their oil tax rates, this reduction will be of great help to consumers in OECD countries even if the price of oil remains about \$40/barrel or even above \$50, because then prices at gas stations, now the equivalent of around Rp 15,000/liter in most of Western Europe, can be lowered. It must be noted that at this price level, only Rp 5,000/liter will go to the oil company while the remaining Rp 10,000/liter will go to various governments as tax revenue.

On the other hand, an increase in the earnings of oil-producing countries as a result of the "high" price, should be returned for investment in the upstream sector to ensure the sustainability of increases in reserves and production levels. It is, however,

understandably difficult for OECD countries to "surrender" to the pressure of their domestic fuel consumers that the fuel tax must be reduced because this reduction will immediately lead to a drop in the state budget of each OECD country.

Nevertheless, this issue can be used as material for a constructive dialog between producing countries and international oil consumers so that they will not view the problems related to the international oil prices and oil fuel taxes from their respective stances.

For Indonesia, where in the past five years, oil production has continued to drop from about 1.5 million barrels per day in 1999 to 1 million barrels per day in 2004, there is no other option but to make every effort to immediately increase its oil exploration and production levels so that it can again be solely an oil exporter.

Lower production and a lack of fresh investment in the oil and gas sector are not only attributable to "natural" factors (aging oil wells and depleted reserves), but also to inappropriate management and legislation — most notably, Law No. 22/2001 on oil and gas, which imposes a variety of discouraging taxes on investors during the exploration stage.

For over 3 decades, in fact, investors were only taxed when they actually discovered and produced oil or gas. If our

production can be raised to over 1.3 million barrels per day, our membership in OPEC will not be questioned by oil executives in Western Europe, a concern that many of them shared with me during various meetings in Germany and France. It is to be noted that the demand for crude oil to fulfill domestic demand in 2004 stands at around 1.3 million barrels per day, while production levels are, as mentioned above, 1 million barrels per day.

If Indonesia fails to raise its production level, not only its membership in OPEC will be in doubt but, more dangerously, it will increase its dependence on imported oil. This poses a great danger to the country's economic resilience and security.

We hope that the new government that is elected next month, will be able to improve this sad situation of our national oil and gas industry. A drop in production when the oil price soars and the oil subsidy continues to increase has led to the government's inability to finance the establishment of educational, health and transportation infrastructure or open up employment opportunities.

The writer is the Director of the Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES), and is a lecturer in the postgraduate program at the University of Indonesia's School of Economics.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN: T. 7 TAHUN 2004

'Pabrik AAF harus segera direlokasi'

JAKARTA (Bisnis): PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) harus direlokasi ke wilayah yang memiliki potensi gas besar seperti Sulawesi dan Papua, agar pabrik tersebut dapat bekerja dengan optimal.

Menristek M. Hatta Rajasa mengatakan telah menugaskan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan audit teknologi terhadap PT AAF, namun hingga sekarang pelaksanaannya masih menunggu dari departemen energi sumber daya mineral (ESDM) yang membawahi perusahaan tersebut.

"Kendati demikian di dalam pelaksanaan audit teknologi, BPPT telah memiliki beberapa pedoman yang akan menjadi rujukan dalam rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah," ujarnya di Jakarta kemarin.

Dia menerangkan ada tiga hal yang akan menjadi dasar pertimbangan yaitu *pertama* dari sudut kelayakan ekonomi apakah mungkin untuk direlokasikan, *kedua* mencari lokasi yang dapat mensuplai pasokan gas secara kontinyu ke pabrik tersebut dan untuk itu harus dicari daerah yang memiliki potensi gas besar namun belum dimanfaatkan.

Ketiga, kata dia, adalah aspek pengembangan kawasan diharapkan dengan dipin-

dahkannya PT AAF ke daerah yang ditunjuk akan membangkitkan perekonomian wilayah itu. "Sehingga mampu menciptakan percepatan pengembangan kawasan."

Langkah terbaik

Menurut Hatta, dari tiga kriteria tersebut yang cocok untuk dijadikan tempat relokasi adalah Sulawesi dan Papua. Kebijakan itu merupakan langkah terbaik untuk menyelamatkan perusahaan tersebut.

Jika PT AAF dipaksakan untuk beroperasi di Aceh dengan memanfaatkan potensi gas di blok A itu akan sangat berat karena mereka harus berebut dengan pabrik lainnya seperti PT PIM 1 dan PIM 2, pabrik kertas dan pembangkit listrik.

Dia menerangkan selain di Sulawesi dan Irian Jaya beberapa daerah memang memiliki potensi untuk dijadikan lokasi pemindahan pabrik tersebut di antaranya adalah Jambi, Palembang, dan Bontang.

Namun penggunaan gas di tiga daerah tersebut sangat besar, lanjut dia, misalnya di Bontang banyak dimanfaatkan untuk pabrik pupuk serta bagi industri lainnya, serta jika ditaruh disana maka percepatan pembangunan kawasan tidak akan terjadi, karena kota itu sudah maju.

Hatta menerangkan se-

dangkan kalau di Jambi dan Palembang, dua provinsi itu sudah memasok kebutuhan gas untuk Singapura dan pulau Jawa sehingga sangat berat jika ditempatkan di sana, kendati lokasinya sangat dekat dengan Aceh.

"Meskipun harus mengeluarkan dana investasi yang besar, namun langkah itu yang terbaik untuk menyelamatkan PT AAF, dari pada kegiatan produksinya terus terganggu karena ketiadaan pasokan gas," tuturnya.

Menurut dia, waktu yang dipergunakan untuk melakukan audit teknologi tergantung dari permintaan pemerintah.

Kalau dilakukan secara komprehensif dengan meneliti semua aspek ekonomi maka akan dibutuhkan waktu satu bulan, tetapi kalau hanya sekedar audit teknologi hanya perlu sekitar dua minggu.

Dia mengatakan BPPT hanya sekedar melakukan audit teknologi, sehingga hasil yang akan mereka berikan sepenuhnya tergantung dari kebijakan pemerintah dan PT AAF.

"Namun kami juga harus mendengar alasan yang diberikan oleh PT AAF jika dia menolak rekomendasi BPPT, sehingga diharapkan keputusan yang dikeluarkan pemerintah tidak menimbulkan konflik dikemudian hari," paparnya. (rni)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T. 8

TAHUN 2004

Industri pelumas melakukan efisiensi

JAKARTA (Bisnis): Pelaku usaha di industri pelumas belum berencana menaikkan harga dan cenderung memilih melakukan efisiensi usaha untuk menyiasati kenaikan biaya bahan baku pelumas.

Timotius Oyong, *General Manager-Evalube Division WGI*, mengungkapkan cukup sulit untuk menaikkan harga produk pelumas saat ini mengingat persaingan pasar sangat ketat seiring makin banyak pemain dengan produk yang kian beragam.

"Saat ini WGI masih memilih untuk tidak menaikkan harga produk, yang kami lakukan saat ini adalah upaya meningkatkan efisiensi perusahaan di semua lini," ujarnya kepada *Bisnis* di sela-sela *The 2th Jakarta Motor Show (JMS) 2004*, kemarin.

Memang, ungkapnya, sejak terjadi kenaikan harga *based oil* (bahan baku pelumas) enam bulan lalu WGI

sudah menaikkan harga empat varian produk pelumas dari 58 varian yang ada.

Keempat varian produk tersebut, kata dia, adalah 2 TT, Drum 2T, Hidrolik dan Molitek rata-rata 5% dari harga semula. "Tapi, varian lainnya tampaknya sulit dan belum ada rencana."

Dalam struktur biaya produksi pelumas, paparnya, kontribusi komponen *based oil* mencapai 60% sehingga kenaikan harga bahan baku sangat mempengaruhi harga pokok penjualan (HPP).

Berdasarkan data *Bisnis*, biaya produksi pelumas di dalam negeri naik sekitar 15% sejak enam bulan lalu akibat kenaikan harga minyak dunia.

"Mungkin kami baru akan menaikkan harga jual pelumas bila pesaing sudah mengambil keputusan itu [menaikkan harga]. Itu pun untuk produk tertentu saja yang sudah tidak mungkin dipertahankan harganya," ujarnya.

Dikhawatirkan, lanjutnya, keputusan menaikkan harga produk tertentu akan mempengaruhi penjualan di pasar. WGI berambisi menaikkan

penguasaan pangsa pasar tahun lalu 10% menjadi 12% tahun ini.

Mico F Kaliki, *Marketing Manager PT Bahana Nusa Lubrindo*—produsen minyak pelumas merek Agip di Indonesia—juga mengakui kesulitan para pelaku usaha di industri pelumas untuk menaikkan harga jual kendati biaya produksi sudah naik hingga 15% akibat persaingan yang semakin ketat.

Bahan utama

Kendati harga minyak sudah naik dua kali lipat, kata dia, namun hingga kini harga pelumas di pasar domestik masih tetap pada kisaran yang sama, padahal minyak merupakan bahan utama yang dipergunakan dalam industri itu.

"Seharusnya harga pelumas sudah naik 10% mengikuti kenaikan harga minyak dunia, namun tampaknya masing-masing pelaku usaha masih saling menunggu untuk menaikkan harga," ujarnya.

Menurut dia, makin banyaknya pemain di sektor itu di tengah pasar yang tidak berkembang dengan signifikan, akan menyulitkan mereka untuk meningkatkan nilai jual

karena khawatir ceruk pasar yang sudah ada diambil oleh pihak lain yang tidak serta merta menaikkan harga.

Dia menambahkan kapasitas terpasang industri pelumas domestik saat ini 1,2 juta kilo liter, sedangkan kebutuhan hanya 650.000 kilo liter dengan 236 pelaku usaha yang bermain di dalamnya.

Mico mengatakan karena makin ketatnya persaingan, ongkos produksi yang terus menerus membengkak tidak memacu pelaku usaha untuk menaikkan harga, bahkan ada pelaku usaha yang menurunkan harga, agar produksi mereka dapat diserap dengan optimal oleh pasar.

Bila salah satu perusahaan menaikkan harga, kata dia, maka segera diikuti oleh pelaku usaha lainnya, "Namun hingga sekarang masih belum ada yang berani untuk melakukannya, karena pasar yang sudah jenuh."

PT Bahana Nusa Lubrindo optimistis dapat memenuhi target penjualan 32.500 kilo liter atau menguasai pangsa pasar domestik sebesar 5%. (mfm)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN : 10 TAHUN 2004

Polri Tetapkan Tiga Tersangka Kasus KBC

Suyitno Landung mengaku lupa nama-nama para tersangka dari Pertamina dan Amerika tersebut.

JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia menetapkan tiga tersangka dalam perkara di Karaha Bodas Company (KBC). Mereka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi di proyek tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri (Kabareskrim Mabes Polri), Komisaris Jenderal Suyitno Landung, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Karaha Bodas Company adalah perusahaan yang mengerjakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bu-

mi di Garut, Jawa Barat. Pada 1994, Pertamina, KBC, dan PLN menandatangani kontrak proyek tersebut. Akibat terpaan krisis ekonomi, atas saran Dana Moneter Internasional (IMF), pada 1997 pemerintah menghentikan 75 proyek infrastruktur, termasuk proyek ini. Lalu, KBC mengadukan kasus ini ke Arbitrase Internasional. KBC juga mengajukan gugatan penyiataan aset-aset Pertamina di pengadilan-pengadilan di luar negeri, seperti di Hongkong, Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura. Beberapa waktu lalu, pengadilan di Hongkong menetapkan penyiataan PT Pertamina Trading (Petrat), anak perusahaan Pertamina di Hongkong. Arbitrase Internasional juga memutuskan bahwa Pertamina untuk membayar klaim sebesar Rp 299 juta dolar AS ke KBC. Namun Pertamina menolak semua tuntutan itu.

Suyitno Landung mengungkapkan penetapan tiga orang tersangka kasus korupsi di KBC itu setelah kepolisi-an mencurigai telah terjadinya penggelembungan nilai proyek (*mark up*). "Itu diproses lanjut, kita tinggal menunggu laporan BPKP," ujarnya.

Menurut Suyitno, dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka berasal dari Pertamina. Kedua orang ini sudah dimintai keterangan oleh Mabes Polri. Namun ketika ditanya inisial dari orang dalam Pertamina itu, ia tidak ingat persis. "Lupa yah, pakai F, lalu yang satunya siapa yah," tuturnya.

Sementara seorang tersangka lainnya, kata Suyitno, merupakan tenaga kerja asing (ekspatriat) asal Amerika Serikat. Warga negara Paman Sam itu berinisial R. Namun sayangnya, tersangka yang satu ini tidak pernah mau memenuhi panggilan

Mabes Polri untuk dimintai keterangan. Tersangka ini masih terus dicari polisi. "Tapi kita sudah siap meski *in absentia*," katanya.

Ketiga tersangka ini diduga telah melakukan korupsi secara bersama-sama di KBC. Suyitno mengakui ber-

kas perkara kasus korupsi ini dalam waktu dekat akan diserahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya diteruskan ke pengadilan negeri. "Kita akan selesaikan secepatnya. Ini kan proses, yang menentukan salah tidaknya nanti di pengadilan," ujarnya. ■ do

23

APA KATA MEREKA

19 Juli 2004

Menneg BUMN Laksamana Sukardi:
Pertamina harus membayar klaim dalam kasus Karaha Bodas Company (KBC), terkait dengan klaim mereka senilai 15-20 juta dolar AS yang mengancam menyita PT Pertamina Trading (anak perusahaan Pertamina di Hongkong). Ini karena Pertamina adalah mitra dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Garut, Jawa Barat. Jadi tak ada hubungannya dengan pemerintah.

Dirut Pertamina saat itu, Arifri Nawawi:
Pertamina menolak tuntutan klaim KBC. Pertamina tak punya komitmen untuk itu. Masalah KBC sudah dise-

rahan sepenuhnya ke pemerintah.

18 Agustus 2004

Dirut Pertamina Widya Purnama:
Pertamina menolak membayar klaim atas tuntutan KBC senilai 299 juta dolar AS di Arbitrase Internasional. Pertamina tidak akan membayar KBC karena terdapat indikasi unsur pidana korupsi. Lagi pula duit Pertamina adalah duit negara, duit rakyat Polri sedang mengusut indikasi korupsi tersebut. Berdasarkan penilaian BPKP, KBC tidak jujur di depan Arbitrase Internasional ketika melaporkan investasinya di Indonesia. BPKP juga menemukan terjadinya penggelembungan. ■

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2004

Migas Melukai RAPBN

2005

Bachrawi Sanusi

Lektor Kepala Fakultas Ekonomi
Universitas Trisakti, Jakarta

Dua berita yang menarik yang dimuat harian ini yakni yang berjudul: "Presiden: IMF Nyaris Bangkrutkan Negara" dan "RAPBN 2005, Beban Utang tak Berkurang" (*Republika*, 18/8). Khusus mengenai utang luar negeri, sejak lama penulis sangat prihatin. Sejak lama saya berpendapat, jika tak bisa bayar utang maka stop utang.

Belasan tahun yang lalu, saya meminta kepada Prof Dr Ali Wardhana (mantan Menkeu dan Menko Ekuin) di kantornya di Lapangan Banteng agar uang migas untuk membayar utang. Namun ia menjawab bahwa banyak negara di dunia meminta pinjaman/utang (terutama kepada IMF ataupun Bank Dunia) tetapi semuanya ditolak, justru Indonesia ditawari utang.

Luka migas

Dengan berita yang dimuat di harian ini bahwa wajah RAPBN 2005 tak banyak berubah memang benar, bahkan semakin penuh kerut wajah yang terluka. Bukan terluka karena utang luar negeri yang sangat banyak dan berkepanjangan, bukan karena para penganggur berpendidikan tinggi makin tinggi, juga bukan karena pemerintah belum berhasil menekan kurs valuta asing, tetapi luka yang cukup berat akibat produksi, ekspor, dan kebutuhan BBM dalam negeri yang terus melonjak. Menurut perhitungan penulis sejak tahun 2003 Indonesia termasuk sebagai negara net importir minyak.

Jika harga minyak dunia tahun 2005 akan terus di atas 40 dolar AS per barel, sedangkan harga minyak per barel dalam RAPBN 2005 dipatok hanya 24 dolar AS per barel, maka jika harga BBM tidak

dinaikkan dan berbagai anggaran belanja negara tidak disusutkan, defisit anggaran pasti melonjak. Apalagi sekiranya kurs dollar AS menjadi di atas Rp 10 ribu per dollar AS.

Sebagai gambaran, berdasarkan perkiraan ekonomi makro pendapatan negara dan hibah RAPBN 2005 direncanakan sebesar Rp 377,9 triliun atau naik Rp 28 triliun atau naik 8 persen daripada tahun

2004. Adapun asumsi angka RAPBN 2005 atas dasar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen; nilai tukar Rp 8.600 per 1 dollar AS; laju inflasi 5,5 persen; suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan 6,5 persen; harga minyak Indonesia 24 dolar AS per barel; produksi minyak bumi sebanyak 1,125 juta barel per hari. Besarnya defisit dari angka RAPBN 2005 sekitar Rp 16,9 triliun.

Dalam RAPBN 2005 jumlah bunga utang diperkirakan Rp 64 triliun. Jumlah kebutuhan pembiayaan untuk pembiayaan dari pokok utang dalam negeri dan luar negeri sebesar Rp 76,5 triliun dan perkiraan defisit anggaran sebesar Rp 16,9 triliun. Jumlah dana untuk pembiayaan dalam RAPBN 2005 diperkirakan sebesar Rp 93,4 triliun. Dana ini direncanakan berasal dari sumber dalam negeri sebesar Rp 66,7 triliun (rekening pemerintah, privatisasi dan penjualan aset, dan penerbitan obligasi) dan dari sumber luar negeri Rp 26,6 triliun (lagi-lagi dari utang luar negeri).

Utang berkepanjangan

Seperti diberitakan (*Republika*, 18/8) untuk pembayaran bunga utang kas negara harus mengeluarkan dana sebanyak Rp 64 triliun. Jumlah ini untuk utang luar negeri sebanyak Rp 25,1 triliun dan utang dalam negeri Rp 38,8 triliun.

Jumlah itu baru bunganya saja, sedangkan cicilan untuk pokok utang yang dipinjam di dalam pos pembiayaan dalam negeri menunjukkan untuk pembayaran pokok dan pembelian kembali (*buy back*) Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 20,914 triliun. Jumlah cicilan pokok utang

Jumlah utang luar negeri dan bunganya akan terus meningkat — bukan hanya karena terus menambah utang — sekiranya kurs rupiah terutama terhadap dolar AS dan yen semakin anjlok.

Jangan salahkan pemberi utang, selayaknya yang berhutang itu sejak lama harus tahu diri. Kurang bijak sekiranya Indonesia yang sudah sejak lama diberi utang luar negeri terutama dari IMF maupun Bank Dunia kemudian kita menyalahkan mereka. Seperti ucapan presiden yang dikutip harian ini: "IMF telah memberikan resep pemulihan ekonomi yang salah dan nyaris membuat Indonesia bangkrut."

Beberapa tahun yang lalu jumlah utang luar negeri Indonesia mencapai 146 miliar dolar AS, 45 persen di antaranya sebagai utang pemerintah. Dalam waktu yang sama jumlah utang di dalam

negeri mencapai Rp 650 triliun. Dalam rupiah, total utang Indonesia lebih dari Rp 2.100 triliun. Dengan jumlah utang luar negeri sebesar 146 miliar dolar AS, berarti Indonesia termasuk negara kelima terbesar di bawah Brasil (282 miliar dolar AS), Meksiko (159 miliar dolar AS), dan Cina (154 miliar dolar AS). Namun di luar Indonesia, negara-negara tersebut memiliki GDP yang sangat besar, sehingga persentase utang terhadap GDP rata-rata di bawah 50 persen.

Sebagai gambaran, realisasi jumlah pendapatan negara hingga 31 Desember 2003 sebesar Rp 341,095 triliun. Jumlah pengeluaran untuk pembayaran bunga utang mencapai Rp 69,235 triliun ditambah pembiayaan cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 16,098 triliun. Ini berarti jumlah pengeluaran hanya untuk utang plus bunganya mencapai Rp 85,331 triliun atau lebih dari 25 persen dari seluruh pendapatan negara pada akhir tahun 2003 hanya untuk bayar bunga dan cicilan utang, terutama utang luar negeri.

Celakanya lagi, dari realisasi APBN 2003 hingga Desember 2003 terlihat defisit sebesar Rp 33,669 triliun ditutup dari pos pembiayaan dalam negeri (Rp 32.114,7 triliun) dan dari

geri (netto Rp 1.554,3 miliar) — adapun penarikan pinjaman luar negeri secara bruto sebesar Rp 17.651,8 miliar yang terdiri dari pinjaman program sebesar Rp 1.792,1 miliar dan pinjaman proyek sebesar 15.859 miliar dolar AS. Jumlah ini dikurangi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 16.097,5 miliar. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah menggunakan strategi gali lubang dari utang luar negeri sebesar Rp 17,6 triliun dan lubangnya ditutup sebesar Rp 16,1 triliun, belum termasuk bunganya.

Dengan jumlah utang Indonesia sebanyak itu di satu sisi, sedangkan di sisi lain sumberdaya alam khususnya minyak bumi menjadi minus karena menjadi negara net importir minyak, berarti rakyat Indonesia akan terus berkepanjangan menanggung utang luar negeri maupun utang dalam negeri.

Tantangan presiden terpilih

Penulis kurang yakin angka yang diajukan pemerintah yang berupa RAPBN 2005 bisa dicapai. Keadaan telah berubah. Pada 1970-an hingga tahun 1980-an, harga minyak dunia yang hanya di bawah 2,50 dolar AS per barel hingga September 1973, menjadi belasan bahkan puluhan dolar AS per barel setelah terjadi perang

Oktober 1973 di Timur Tengah. Bahkan sekarang harga minyak dunia sudah melampaui 45 dolar AS per barel.

Pada waktu itu Indonesia masih sebagai negara net eksportir minyak, apalagi pada 1977 produksi minyak mentah Indonesia mencapai hampir 1,7 juta barel per hari, tertinggi sepanjang sejarah perminyakan Indonesia. Kebutuhan BBM yang dijual di dalam negeri pada tahun 1977 hanya sebanyak 16 juta kiloliter atau hanya sekitar 0,27 juta barel per hari. Devisa minyak sangat tinggi, ditambah lagi sejak tahun 1977 Indonesia mulai berhasil ekspor LNG.

Lain lagi dengan keadaan APBN 2004. Kini, harga minyak dunia mencapai di 45 dolar AS per barel, tetapi harga minyak dalam APBN dipatok hanya 22 dolar AS per barel, akibatnya subsidi BBM melonjak, begitu juga defisit anggaran makin besar. Jadi tidak ada *windfall profit* dari minyak bumi karena RAPBN 2005 mematok harga minyak 24 dolar AS per barel. Penulis kurang yakin harga minyak dunia bisa mencapai 24 dolar AS per barel seperti asumsi RAPBN.

Penentu harga

Penentu harga minyak dunia — yang bisa mempermainkan pasokan minyak dunia — antara lain para kaum spekulan. Mereka adalah para pengusaha migas dunia, termasuk para kontraktor migas dunia yang melakukan kegiatan di OPEC dan di non-OPEC. Pasokan minyak dunia juga ditentukan kemampuan OECD dalam menyediakan minyak, kemampuan serta kemauan OPEC menambah produksi, masalah minyak Rusia yang sedang dilanda keributan akibat masalah di perusahaan minyak Yukos, perkembangan produksi dan pemanfaatan energi alternatif dunia, kebijakan George W Bush soal minyak dunia, jumlah kebutuhan minyak dunia, dan lain-lain.

Jika harga minyak dunia pada tahun APBN 2005 ternyata masih sekitar 40 dolar AS per barel, maka presiden terpilih akan menghadapi kondisi ekonomi dan moneter Indonesia yang semakin prihatin. Masalah harga minyak dunia tinggi merupakan hal yang sangat berat bagi bangsa Indonesia. Ditambah lagi produksi minyak bumi RAPBN 2005 hanya sebesar 1,125 juta barel per hari. Nyatanya mungkin akan semakin terus turun. Apalagi ditambah kurs dolar AS mencapai di atas Rp 10 ribu per dolar AS.

RAPBN 2005 adalah tantangan bagi presiden terpilih. ■